

BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016 dan kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik Antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016. Adapun pembahasannya sebagai berikut.

A. Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang sudah di anggap lumrah oleh masyarakat di Indonesia, bahkan ada sebuah pendapat yang menganggap bahwa tawuran merupakan salah satu kegiatan rutin dari pelajar yang menginjak usia remaja, tawuran antar pelajar sering terjadi di kota-kota besar yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang lebih maju, para pelajar remaja yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian di luar sekolah dari pada, masuk kelas pada kegiatan belajar mengajar. Tawuran merupakan salah satu indikasi anak, mempunyai gangguan perilaku, gangguan perilaku terjadi karena ketidakmampuan suatu individu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sosial tetapi, lebih mengarah atau cenderung pada orang-orang di sekelilingnya.

Perilaku yang dilakukan oleh anak yang mengidap gangguan perilaku ini yang menyebabkan tawuran antar pelajar kerap terjadi belakangan ini. Tawuran

tersebut telah menjadi kegiatan yang turun temurun terhadap sekolah tersebut, sehingga tidak heran apabila ada yang berpendapat bahwa tawuran sudah membudaya atau sudah menjadi tradisi pada sekolah tertentu. Kerugian yang di sebabkan oleh tawuran tidak hanya menimpa korban dari tawuran saja, tetapi juga mengakibatkan kerusakan di tempat mereka melakukan aksi tersebut. Tentunya kebanyakan dari para pelaku tawuran tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan. Biasanya mereka hanya lari setelah puas melakukan tawuran, akibatnya masyarakat menjadi resah terhadap kegiatan pelajar remaja. Keresahan ini akan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan bangsa. Oleh karena itu, untuk mengatasi tawuran antar pelajar tersebut semua pihak khususnya Dinas Pendidikan dan seluruh lapisan harus terjun langsung terlibat agar permasalahan tersebut tidak membudaya dari waktu ke waktu.

Peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pentingnya peranan adalah ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas – batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang – orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Hal ini

mengingat, jika tawuran tidak di atasi sedini mungkin akan menimbulkan dampak bagi orang banyak.

Hal ini sejalan dengan teori KBBI (2012) menjelaskan dampak tawuran antar pelajar mampu menimbulkan kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban. baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian; masyarakat sekitar juga dirugikan; terganggunya proses belajar mengajar; menurunnya moralitas para pelajar; hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai; dan rusaknya sarana prasarana umum, seperti bus, halte dan fasilitas lainnya. serta fasilitas pribadi seperti kendaraan sendiri.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penanganan tawuran antar pelajar ditinjau dari sisi peran Dinas Pendidikan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena Dinas Pendidikan merupakan lini pertama setelah pemerintah untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Adapun peran yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan di uraikan sebagai berikut.

1. Peran Dinas Pendidikan sebagai Fasilitator

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta terangkum dalam cuplikan di bawah ini.

“Salah satu peran yang kita lakukan adalah sebagai fasilitator mbak.....supaya tercipta kondisi yang kondusif.....hal tersebut tentunya melibatkan pihak sekolah untuk melakukan upaya preventif dan kuratif”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak di Dinas Pendidikan diketahui jika sebagai fasilitator peran Dinas adalah menciptakan suasana kondusif terhadap pihak-pihak yang terlibat tawuran. Suasana kondusif tersebut dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya kuratif (penanganan).

a. Upaya Preventif

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta terangkum dalam cuplikan di bawah ini.

“Yang pasti harus dilakukan pencegahan, penting mbak supaya tidak membudaya. Nah dinas kan tidak bisa langsung turun tangan makanya kita koordinasi dengan pihak sekolah supaya langsung kepada sasaran yaitu siswa yang sudah pernah dan dimungkinkan akan menjadi pelaku tawuran”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan jika upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Hal ini menjadi penting mengingat, sekolah merupakan tempat yang langsung bersentuhan dengan peserta didik. Sekolah dituntut oleh pihak dinas untuk memberikan pendidikan formal dengan kegiatan belajar anak diatur, namun jika proses belajar tidak berjalan semestinya akan menimbulkan perilaku menyimpang bagi anak remaja (siswa).

Tindakan yang dilakukan dinas supaya proses pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan melakukan kerjasama dengan guru dan kepala sekolah dan membantu sekolah untuk kelengkapan sarana dan prasaranya. Hal ini sejalan dengan wawancara Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta terangkum dalam cuplikan di bawah ini.

“kerjasama dengan kepala sekolah dan guru serta kami pihak dinas mendukung dalam bentuk pengajuan sarana prasarana”.

Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan hal yang sama jika.

“Dinas mendukung dalam hal apapun selama itu positif untuk pengembangan sekolah mbak....ya seperti sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat siswa”.

Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta dan Kepala Bagian Sekolah menengah Atas sejalan dengan wawancara pihak Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“Dinas Pendidikan sangat berperan mbak.....kami pihak sekolah di koordinasi dan di dukung dalam prosen pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan sebagaimana mestinya dan peserta didik folus pada lingkup sekolah”.

Hasil wawancara pihak Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta sejalan dengan kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“Dinas Pendidikan sangat berperan sekali.....kami para guru di arahkan dan dibantu keterdukungan fasilitasnya”.

Lebih lanjut pihak Dinas Pendidikan menjelaskan jika peran dinas adalah melakukan langkah konkrit yaitu menunjuk sekolah supaya guru bimbingan konseling langsung bersinggungan kepada siswa agar mampu memberikan bantuan secara langsung kepada siswa yang belum maupun yang sudah pernah terlibat tawuran.

“Gak hanya itu mbak kami juga menuntut sekolah untuk bekerjasama dengan orangtua siswa dan membuat segala hal yang mampu menimbulkan efek jera bisa jadi melalui aturan yang dibuat lebih ketat dari biasanya”.

Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan hal yang sama jika.

“Saya sebagai kepala bagian menengah atas mbak senantiasa menuntut sekolah supaya melakukan komunikasi katif dengan lingkungan siswa khususnya wali atau orangtua siswa”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan jika sebagai upaya preventif pihak dinas melakukan upaya dengan cara menginstruksikan kepada sekolah supaya sosialisasi kepada orangtua pada waktu PPDB; membuat surat pernyataan tidak boleh melanggar peraturan sekolah saat diterima di sekolah; dan membuat tim di kesiswaan (Osis), mengintensifkan bimbingan dan konseling di sekolah, serta melengkapi sarana dan prasarana sekolah seperti laboratorium alat olahraga, masjid, kesenian alat-alat keterampilan.

Tindakan preventif lainnya yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian. Hal ini dilakukan guna memberikan pengawasan kepada peserta didik agar tidak keluyuran saat jam belajar berlangsung, adapun

inisiasi ini tercermin dalam program satu sekolah dua polisi (SSDP) kegiatan tersebut peneliti sebut sebagai tindakan preventif karena sifatnya yang mengontrol dan Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kepolisian sekaligus Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta untuk melaksanakan program SSDP ini. Program ini cukup berhasil dalam menekan angka konflik antar pelajar di Kota Yogyakarta di buktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Tawuran Pelajar di Kota Yogyakarta

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1. | 2011 | 9 |
| 2. | 2012 | 7 |
| 3. | 2013 | 5 |
| 4. | 2014 | 3 |
| 5. | 2015 | 1 |

Sumber: Poltabes Yogyakarta (2011-2015) di olah

Selain tindakan preventif dengan SSDP (satu sekolah dua polisi), tindakan preventif lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kepolisian Kota Yogyakarta dan *Stakeholders* lainnya adalah dengan siaga anak sekolah keluyuran di jam sekolah. Apabila didapati ada pelajar keluyuran di luar jam sekolah maka siapapun berhak termasuk masyarakat melakukan peneguran dan melaporkan ke pihak sekolah atau pihak kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban di sekolah tersebut.

b. Upaya Kuratif

Upaya kuratif yang dilakukan dalam menanggulangi kenakalan remaja ialah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut, supaya tidak meluas dan merugikan masyarakat. Bentuk antisipasi yang dilakukan pihak Dinas sejatinya lebih banyak dilakukan oleh pihak sekolah atas koordinasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan pihak sekolah merupakan tempat yang langsung bersinggungan dengan siswa.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta terangkum dalam cuplikan di bawah ini.

“Kalau upaya kuratif kami lebih banyak menyerahkan kepada pihak sekolah. Akan tetapi bukan berarti kami lepas tangan mbak, tepat itu dibawah koordinasi dan sepengetahuan kedua belah pihak. Nah....biasanya tindakan kuratif itu sama sekolah dilakukan upaya seperti membuat tata tertib sekolah, melakukan pembatasan jam siswa berada dilingkungan sekolah, pemberian sanksi hingga sekolah siap mengembalikan kepada orangtuanya”.

Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan hal yang sama jika.

“Upaya kuratif itu akan kami tangani jika sekolah sudah tidak mampu mengatasi mbak, misalnya dalam pengambilan keputusan mengeluarkan anak dari sekolah. Nah kami pihak dinas akan mengevaluasi dulu melakukan selidik dan mempertimbangkan apakah langkah sekolah tepat atau masih bisa dilakukan perbaikan”.

Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta dan kepala Bagian Menengah Atas sejalan dengan wawancara pihak Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“Semua hal yang kami lakukan itu atas sepengetahuan dinas mbak....langkah kuratifnya sama seperti sekolah lain yaitu membuat tata tertib sekolah, melakukan pembatasan jam siswa berada dilingkungan sekolah, pemberian sanksi hingga sekolah siap mengembalikan kepada orangtuanya. Jadi langkah ini adalah kesepakatan kami seluruh kepala sekolah di DIY dengan pihak dinas mbak”.

Hasil wawancara pihak Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta sejalan dengan kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“Kalau dari kesepakatan seluruh kepala sekolah di DIY tindakan kami itu ya seperti membuat tata tertib sekolah, melakukan pembatasan jam siswa berada dilingkungan sekolah, pemberian sanksi hingga sekolah siap mengembalikan kepada orangtuanya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan jika tindakan kuratif yang dilakukan dinas adalah mengkoordinir sekolah supaya membuat tata tertib sekolah, melakukan pembatasan jam siswa berada dilingkungan sekolah, pemberian sanksi hingga sekolah siap mengembalikan kepada orangtuanya.

Tata tertib di sekolah dilakukan supaya siswa ada batasan ketika akan melakukan tindakan yang berlebihan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang banyak. Pembatasan jam dilakukan secara bertahap hingga sekarang pembatasan jam siswa berada dilingkungan sekolah sampai dengan jam 17.00 WIB. Namun, khusus untuk jurusan tertentu pembatasan waktu sampai jam 19.00 WIB dikarenakan ada praktik kejuruan. Adapun strategi yang dilakukan sekolah untuk mendukung keterlaksanaan kebijakan yaitu siswa diperbolehkan berada dilingkungan sekolah dan di dampingi oleh guru pembimbing kegiatan.

Pemberian sanksi dilakukan kepada siswa yang melanggar peraturan ditangani sesuai dengan tingkat kenakalan siswa. Bagi siswa yang masih bisa dinasihati maka pendidik akan menasehati agar siswa menyadari kesalahannya. Pemberian sanksi yang berat biasanya dilakukan ketika siswa melakukan kenakalan berat pula, dan terdapat pembinaan yang melibatkan orangtua. Jika siswa sudah tidak mampu didik dan di bina maka sekolah akan mengembalikan kepada orangtuanya. Pengembalian siswa kepada orangtuanya itu melalui prosedur yang panjang dan rapat bersama antar semua pihak yang terkait. Keputusan tersebut diambil berdasarkan berbagai pertimbangan seluruh warga sekolah. Pengembalian siswa itu juga yang memang benar-benar merugikan dan sulit untuk dibenahi.

Berikut adalah tahapan pembinaan dan pemberian sanksi pelanggaran tata tertib sekolah SMA Muhammadiyah 3 dan 7 Yogyakarta:

Tabel 3.2 Peraturan Tata Tertib SMA Muhammadiyah 3 dan 7 Kota Yogyakarta

| No | Nilai Pelanggaran | Tahapan Pembinaan dan Sanksi | Petugas |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | 1-5 | Teguran Lisan | Tim ketertiban, Guru, Wali Kelas |
| 2. | 6-20 | Pembinaan/teguran Lisan + membuat Surat Pernyataan | Tim ketertiban, Guru, Wali Kelas |
| 3. | 21-50 | 1. Peringatan tertulis bermaterai 2. Pemanggilan orang tua 3. Skorsing 2 hari | Tim ketertiban, Guru, Wali Kelas, Guru BK dan Kesiswaan |
| 4. | 51-75 | 1. Peringatan tertulis bermaterai 2. Pemanggilan orang tua | Tim ketertiban, Guru, Wali Kelas, Guru BK dan Kesiswaan |

| | | | |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | 3. Skorsing 4 hari | |
| 5. | 76-90 | 1. Peringatan tertulis bermaterai 2. Pemanggilan orang tua 3. Skorsing 6 hari | Tim ketertiban, Guru, Wali Kelas, Guru BK dan Kesiswaan |
| 6. | 91-100 | 1. Peringatan tertulis bermaterai 2. Pemanggilan orang tua 3. Skorsing 2Minggu | Tim ketertiban, Guru, Wali Kelas, Guru BK dan Kesiswaan, Kepala Sekolah |
| 7. | > 101 | Di Kembalikan ke orang tua | Wali Kelas, Guru BK dan Kesiswaan, Kepala Sekolah |

Sumber : Buku Pedoman Sekolah SMA Muhammadiyah 3 dan 7 Yogyakarta Tahun 2018

Selain itu juga Dinas Pendidikan bersama Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga menginisiasi program penggemblengan bagi pelajar yang sering terlibat tawuran, adapun penggemblengan tersebut dilakukan selama tiga hari tiga malam dengan kemasan *Outbond*.

Upaya tersebut menjadi penting dalam mengatasi tawuran mengingat, perkelahian antar pelajar yang banyak terjadi di Indonesia menimbulkan keprihatinan dan kecemasan bagi banyak pihak. Kenakalan remaja yang tergambar dalam tawuran pelajar tersebut telah banyak mengakibatkan dampak-dampak negatif bagi pelajar secara individu maupun pihak lainnya (sekolah dan masyarakat).

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan antara lain: dampak psikologi dengan timbulnya stres, frustrasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu; merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran; merusak nama

baik sekolah sebagai lembaga pendidikan; terganggunya proses belajar-mengajar; merusak fasilitas umum, contohnya halte bus yang digunakan pelajar sebagai tempat untuk ‘mengintai’ pelajar dari sekolah lain; timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar tempat yang digunakan sebagai tempat kejadian tawuran pelajar; dan bahkan adanya korban luka maupun meninggal dari pelajar yang terlibat tawuran atau pihak lain yang ada di lokasi kejadian tawuran pelajar tersebut.

Dampak-dampak negatif tersebut menyebabkan berbagai pihak; dari orangtua, sekolah pemerintah, dan masyarakat pada umumnya; berusaha untuk menuntaskannya. Berbagai cara telah diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan tawuran pelajar yang semakin marak, khususnya di kota besar, tetapi tetap saja tawuran tersebut terjadi.

2. Peran Dinas Pendidikan sebagai Pelayan Masyarakat

Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta terangkum dalam cuplikan di bawah ini.

“bentuk pelayanan kami itu mengembangkan bakat dan potensi generasi muda mbak melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Lalu dalam kurun waktu tertentu kami melibatkan para generasi tersebut supaya ikut kompetisi sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan tentunya jika sudah menjadi sosok yang dapat dibanggakan akan kita kembalikan kepada orangtua dan masyarakat supaya dapat menjadi contoh bagi generasi penerusnya”.

Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta sejalan dengan wawancara pihak Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“disini Dinas itu memfasilitasi sekolah mbak supaya kegiatan ekstrakurikuler banyak beragam dan mampu mengampu seluruh bakat dan potensi peserta didik”.

Hasil wawancara pihak Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta sejalan dengan kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“bentuk pelayan masyarakat dari pihak dinas untuk kami ya itu menggalang berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu libur remaja dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu kearah tercapainya tujuan pendidikan”.

Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga sesudah rumah dan sekolah. Ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kegiatan-kegiatan yang membantu kearah tercapainya pendidikan pihak Dinas Pendidikan melakukan upaya bimbingan waktu luang oleh guru, orang tua dan masyarakat lainnnya. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta:

“Kami itu menggalang berbagai macam jenis kegiatan mbak, kegiatan tersebut kami klasifikasikan dalam bentuk hobi, keterampilan organisasi dan kegiatan sosial”.

Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan hal yang sama jika:

“1) Bersifat hobi meliputi kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara); elektronika; botani dan biologi; mencintai alam (mendaki gunung, camping); home industri. 2) Bersifat keterampilan organisasi meliputi Oraganisasi taruna karya; Organisasi remaja yang independen; Organisasi olahraga; Pramuka. 3) Bersifat kegiatan sosial meliputi Palang Merah Remaja (PMR) dan Dinas Ambulance Remaja; Badan Keamanan Remaja (hansip/kamra remaja), Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL/BKU); dan Pemadam Kebakaran Remaja”.

Dari pernyataan pihak dinas tersebut peneliti melakukan observasi di sekolah yang menjadi rujukan penelitian diketahui jika semua kegiatan tersebut tidak dilakukan seluruhnya oleh SMA Muhammadiyah 3 dan SMA Muhammadiyah 7 karena keterbatasan waktu siswa dan sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh kedua sekolah tersebut yaitu bersifat hobi meliputi kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara); elektronika; botani dan biologi; mencintai alam (mendaki gunung, camping). 2) Bersifat keterampilan organisasi meliputi Organisasi remaja yang independen (OSIS); Organisasi olahraga; dan Pramuka. 3) Bersifat kegiatan sosial meliputi Palang Merah Remaja (PMR), Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL/BKU); dan Pemadam Kebakaran Remaja. Seluruh kegiatan tersebut diberlakukan dari saat kelas X hingga kelas XI dan kelas XII di bebas tugaskan karena siswa di arahkan untuk persiapan Ujian negara (UN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan jika peran dinas sebagai pelayan masyarakat adalah melakukan upaya bimbingan waktu luang oleh guru, orang tua dan masyarakat lainnya. Upaya bimbingan waktu luang dilakukan dengan cara menggalang kegiatan yang bersifat hobi, organisasi kemasyarakatan, dan bersifat kegiatan sosial. Kegiatan yang dilakukan SMA Muhammadiyah 3 dan SMA Muhammadiyah 7 yang bersifat hobi meliputi kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara); elektronika; botani dan biologi; mencintai alam (mendaki gunung, camping). 2) Bersifat keterampilan organisasi meliputi Organisasi remaja yang independen (OSIS); Organisasi olahraga; dan Pramuka. 3) Bersifat kegiatan sosial

meliputi Palang Merah Remaja (PMR), Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL/BKU); dan Pemadam Kebakaran Remaja. Seluruh kegiatan tersebut diberlakukan dari saat kelas X hingga kelas XI dan kelas XII di bebas tugaskan karena siswa di arahkan untuk persiapan Ujian negara (UN).

Peristiwa tawuran pelajar merupakan salah satu tindak kenakalan remaja. Pelajar yang seharusnya belajar dan mendapatkan pendidikan yang berguna untuk masa depannya, berbalik saling menyerang satu sama lain. Tiap tahun muncul peristiwa tawuran pelajar yang menyebabkan timbulnya ketakutan pada masyarakat. Para pelajar tidak segan-segan menggunakan benda-benda tajam untuk melukai, merusak, mencederai, bahkan menewaskan pihak lain. Walaupun tawuran pelajar tetap marak terjadi, berbagai pihak yang berkomitmen untuk mengatasi, contohnya pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, dan orangtua belum mampu untuk menuntaskan masalah tersebut.

Tawuran pelajar adalah kejahatan yang biasanya di kota-kota besar dan biasanya didasari karena alasan solidaritas. Anak-anak pelajar adalah remaja harapan bangsa, yang akan menggantikan para pemimpin bangsa ini. Tawuran pelajar yang sudah menjadi budaya akan sulit diberantas karena siswa siswi yang bandel akan menjadi provokator tawuran dan memaksa teman-temannya serta adik kelas untuk ikut ambil bagian dalam tawuran antar pelajar. Bagi yang tidak ikut tawuran biasanya akan dimusuhi, dikerjai, dimaki-maki, diejek, difitnah, bahkan bisa diperlakukan kasar dari para pelajar nakal. Peran sekolah, lingkungan, orangtua dan pemerintah

merupakan satu kesatuan yang harus bertanggung jawab dan bekerjasama dengan baik untuk menanggulangi permasalahan ini. Salah satunya dinas pendidikan adalah dengan mengadakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler dan mengadakan kompetisi antar kota, nasional, dan internasional.

3. Peran Dinas Pendidikan sebagai Pendamping

Dalam menjalankan peran sebagai pendamping, Dinas Pendidikan mendampingi berbagai program yang dibuat untuk penyelenggaraan sekolah inklusi. Dalam peran ini pemerintah tidak melepaskan begitu saja program-program yang dijalankannya pada sekolah. Pada setiap programnya, pihak dari Dinas Pendidikan pasti ikut terjun ke lapangan untuk mendampingi dan melihat keberlangsungan programnya. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta, yaitu:

“Dalam setiap program atau kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan ini, kami selaku pihak Dinas selalu ikut ke lapangan. Walaupun kami sudah membentuk tim, namun dalam pelaksanaannya kami selalu ikut terlibat”.

Seperti yang terjadi di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Pihak Dinas Pendidikan selalu mendampingi sekolah ini jika sekolah ini dalam berbagai kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar. Mengingat stigma yang melekat pada dua sekolah tersebut sudah sangat jauh dari citra positif sehingga pendampingan dilakukan dalam bentuk intervensi agar tindakan berupa tawuran tidak terulang kembali.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta, menyatakan jika:

“Bentuk pendampingan kami itu dengan cara peran BK (bimbingan konseling) harus diaktifkan dalam rangka pembinaan mental siswa, dan mendorong sekolah dalam rangka penyediaan fasilitas untuk menyalurkan energi siswa contohnya menyediakan program ekstrakurikuler dengan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang variatif.”

Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan hal yang sama jika:

“Bentuk pendampingan dengan cara peran BK (bimbingan konseling) diaktifkan secara kontinue dan terus menerus masuk ke dalam kurikulum dan pembelajaran, dan mendorong sekolah dalam rangka penyediaan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler beragam”.

Dari pernyataan pihak dinas tersebut peneliti melakukan observasi di SMA Muhammadiyah 3 dan SMA Muhammadiyah 7. Hasil observasi tersebut sejalan dengan wawancara kepala Dinas jika peran BK sudah diaktifkan kembali dengan diberlakukannya pembelajaran dari kelas ke kelas selama satu kali pertemuan dalam satu minggu satu jam mata pelajaran dari kelas X hingga kelas XII. Selain itu, pihak Dinas juga mendorong sekolah dalam rangka penyediaan fasilitas untuk menyalurkan energi siswa dengan adanya berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara); elektronika; botani dan biologi; mencintai alam (mendaki gunung, camping); Organisasi remaja yang independen (OSIS); Organisasi olahraga; Pramuka; Palang Merah Remaja (PMR), Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL/BKU); dan Pemadam Kebakaran Remaja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat dijelaskan jika peran Dinas Pendidikan sebagai pendamping yaitu mengintervensi

sekolah supaya peran BK diaktifkan kembali dengan diberlakukannya pembelajaran dari kelas ke kelas selama satu kali pertemuan dalam satu minggu satu jam mata pelajaran dari kelas X hingga kelas XII. Selain itu, pihak Dinas juga mendorong sekolah dalam rangka penyediaan fasilitas untuk menyalurkan energi siswa dengan adanya berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara); elektronika; botani dan biologi; mencintai alam (mendaki gunung, camping); Organisasi remaja yang independen (OSIS); Organisasi olahraga; Pramuka; Palang Merah Remaja (PMR), Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL/BKU); dan Pemadam Kebakaran Remaja. Cara Dinas Pendidikan mendampingi yaitu melakukan evaluasi kepada sekolah setiap satu semester satu kali untuk mengukur tingkat indiscipliner yang dilakukan siswa dan meminta data kegiatan sekolah dalam bentuk ekstrakurikuler beserta jumlah siswa yang terlibat secara rutin setiap satu semester satu kali.

Sebagai pendamping Dinas pendidikan mendukung segala bentuk langkah pihak sekolah dalam mengatasi tawuran. Atas sepengetahuan Dinas Pendidikan sekolah membuat kebijakan bagi siswa siswi yang terlibat dalam tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Jika semua siswa terlibat tawuran maka sekolah akan memberhentikan semua siswa dan melakukan penerimaan siswa baru dan pindahan. Setiap pelajar siswa siswi harus dibuat takut dengan berbagai hukuman yang akan diterima jika ikut serta dalam

aksi tawuran. Bagi yang membawa senjata tajam dan senjata khas tawuran lainnya juga harus diberi sanksi.

Sekolah juga memberikan pendidikan anti tawuran dengan cara pelajar diberikan pemahaman tentang tata cara menghancurkan akar-akan penyebab tawuran dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa kekerasan jika terjadi suatu hal, selalu berperilaku sopan dan melaporkan rencana pelajar-pelajar badung yang merencanakan penyerangan terhadap pelajar sekolah lain. Jika diserang diajarkan untuk mengalah dan tidak melakukan serangan balasan, kecuali terpaksa. Selain itu, sekolah atas instruksi dinas juga membuat berbagai macam kompetisi yang bersifat positif dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

4. Peran Pemerintah Sebagai Mitra

Hasil wawancara pihak Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“Dinas pendidikan dalam menjalin mitra tentunya tidak hanya kami pihak sekolah dan orangtua tapi juga berbagai macam universitas tersohor di Yogyakarta supaya pola pikir anak yang suka berbaaur dengan tawuran dalam berubah sedikit demi sedikit”.

Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“Mitra disini itu tidak hanya sekolah dan orangtua mbak.....kami membangun hubungan dengan universitas dan LSM supaya mampu membuka wawasan baru bagi pelajar yang suka tawuran tersebut, bahwa di luar sana masih banyak hal-hal positif yang dapat dilakukan selain tawuran tadi”.

Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan hal yang sama jika:

“Menjalin komunikasi dengan pihak ke tiga yaitu universitas ternama di Yogyakarta seperti UGM, UNY, UKDW, dan UII. Ya supaya siswa itu visioner mbak, mempunyai cita-cita yang jelas sehingga mampu meminimalisir konflik yang ada hingga sekarang”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan jika pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dilakukan pemerintah Kota secara mandiri, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan menjalin kerjasama dengan pihak – pihak ketiga. Peran Pemerintah Kota dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga agar mendapat dukungan dari berbagai pihak demi terlaksananya program yang sudah dicanangkan, selain itu juga untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi baik dari Pemerintah Kota sendiri atau dari pihak sekolah.

Pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peran pemerintah sampai pada tahun ini adalah pihak Universitas, termasuk disini ada Universitas Negeri Yogyakarta berbagai jurusan, Universitas Gajah Mada biasanya dari jurusan psikologi untuk penyelenggaraan asesmen anak, Universitas Islam Negeri, dan Universitas Kristen Duta wacana. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah studi banding dari berbagai Universitas ternama di Yogyakarta supaya siswa menjadi sosok yang visioner sehingga memiliki tekad dan cita-cita yang positif sehingga mampu meminimalisir untuk terlibat dalam hal-hal negatif salah satunya konflik antar sekolah. Studi banding tersebut dilakukan pada kelas X dengan maksud siswa menjadi paham akan potensi yang dimiliki dan dapat diarahkan sedini mungkin supaya apa yang menjadi harapannya tercapai. Cara dinas pendidikan berperan sebagai mitra adalah dengan melakukan penjadwalan

bagi setiap SMA yang berada di Yogyakarta supaya dapat melakukan studi banding secara bergilir ke universitas yang ditunjuk.

Tindakan dinas tersebut sejalan dengan teori Mindes (2006: 24) yang menjelaskan jika tindakan tersebut sebagai resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

5. Peran Dinas Pendidikan Sebagai Penyandang Dana

Hasil wawancara pihak Kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“Dinas pendidikan membantu ketersediaan sapsras melalui pengajuan kebutuhan alat-alat yang diperlukan sekolah”.

Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta yang menjelaskan jika:

“Kalau kami ini akan mendukung langkah baik sekolah, dalam hal pendanaan kami siap membantu jika ada dananya jika tepat sasaran dan kebutuhannya”.

Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan hal yang sama jika:

“Ada dana khusus dalam mengatasi konflik antar sekolah ini mba. Sektor pendidikan mendapat porsi terbesar dalam alokasi rencana anggaran Kota Yogyakarta 2018 yakni sebesar Rp 418 miliar. Akan tetapi pengkhususan dalam menangani konflik itu kita bagi pada sektor yang beragam”.

Hasil wawancara dengan kepala Bagian Sekolah menengah Atas diketahui jika penanganan tawuran tidak dilakukan secara langsung. Akan tetapi melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD).

Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan hal yang sama jika:

“Kami dari dinas mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk Bosda baik sekolah negeri maupun swasta, sedang untuk JPD dianggarkan Rp 30 miliar. Anggaran yang ada diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dan berkarakter.”

Lebih lanjut Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas Yogyakarta menuturkan jika:

"Dana Bosda hanya digunakan untuk kepentingan operasional sekolah, termasuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah semisal pengadaan fasilitas jaringan internet. Untuk anggaran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Dinas menganggarkan Rp 30 miliar untuk bantuan bagi siswa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). Nilai JPD bagi siswa berbeda-beda nilainya mulai dari Rp 1 juta - Rp 3 juta setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan karakter melalui sekolah dengan lebih banyak kegiatan praktik tak hanya sekedar pendidikan teori saja".

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan jika dalam menjalankan peran ini, Dinas Pendidikan menganggarkan dari APBD

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Peran sebagai penyandang dana disini Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk Bosda baik sekolah negeri maupun swasta, sedang untuk JPD dianggarkan Rp 30 miliar. Anggaran yang ada diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dan berkarakter.

Dana Bosda hanya digunakan untuk kepentingan operasional sekolah, termasuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah semisal pengadaan fasilitas jaringan internet. Anggaran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Dinas menganggarkan Rp 30 miliar untuk bantuan bagi siswa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). Nilai JPD bagi siswa berbeda-beda nilainya mulai dari Rp 1 juta - Rp 3 juta setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan karakter melalui sekolah dengan lebih banyak kegiatan praktik tak hanya sekedar pendidikan teori saja.

Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas – batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang – orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Dinas-dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung dan rugi, tetapi dalam batas – batas tertentu dapat didayagunakan sebagai organisasi yang memberikan pelayanan yang berorientasi pada pengembangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori Sihombing (2001: 172) pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

B. Kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik antar Sekolah Menengah Atas

Adapun peran yang dilakukan dinas pendidikan tidak luput dari kendala-kendala yang ada. Adapun sebagai berikut.

1. Kurangnya Komunikasi Orang Tua dan Sekolah

Proses pembinaan ke siswa baik secara umum maupun siswa bermasalah membutuhkan komunikasi orangtua dan siswa di sekolah. Namun kenyataannya kesibukan orangtua maka kurangnya komunikasi dari orang tua menghambat penanganan bullying di sekolah. Ada beberapa orangtua yang menyadari pentingnya berkomunikasi dengan sekolah dalam rangka melihat perkembangan siswa di sekolah, tetapi juga masih ada orangtua yang masih kurang memperhatikan siswa. Kondisi seperti ini yang dirasa masih memerlukan perbaikan.

Dalam mengatasi kendala tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat jadwal persemester untuk pertemuan rutin antara orangtua dan sekolah supaya dapat mengetahui perkembangan masing-masing siswa yang didasarkan pada nilai hasil belajarnya sehingga siswa yang tidak mengalami perkembangan hasil belajar dapat dievaluasi secara langsung oleh orangtua maupun sekolah secara bersama-sama.

2. Keterbatasan Biaya untuk Melakukan Penanganan yang Lebih Khusus

Biaya sebagai komponen yang penting dalam mendukung penanganan bullying yang optimal. Pada kenyataannya penanganan masalah tawuran antar pelajar masih bersifat umum, sehingga penanganan masalah tawuran antar pelajar secara khusus masih belum terlaksana. Kondisi ini dapat diatasi dengan cara mengajukan pengajuan dana secara khusus kepada Dinas untuk penanganan pelaku konflik antar sekolah sehingga tawuran tersebut tidak menjadi budaya yang dapat diwariskan generasi penerusnya.

3. Dukungan dan Kerjasama Pihak Lain yang Masih Kurang

Berdasarkan hasil pemaparan terkait dukungan dan kerjasama dengan pihak lain dalam penanganan masalah tawuran antar pelajar dapat disimpulkan bahwa dukungan dan kerjasama dengan pihak lain masih kurang. Hal ini berpengaruh pada penanganan masalah tawuran antar pelajar yang dilakukan sekolah yang sifatnya intern. Kondisi ini dapat diatasi dengan cara melakukan kerjasama dengan psikiater atau psikolog handal dan kompeten dalam bentuk pendampingan kepada pelaku tawuran supaya

dapat mengevaluasi tindakan yang dilakukan dan supaya kejadian tersebut tidak diulangi kembali.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan jika kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas meliputi masih adanya orangtua yang kurang perhatian terhadap siswa, kurangnya komunikasi orang tua dan sekolah, keterbatasan biaya untuk melakukan penanganan yang lebih khusus, dan dukungan dan kerjasama pihak lain yang masih kurang.

Tawuran atau Tubir adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Sebab tawuran ada beragam, mulai dari hal sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok. Tawuran paling banyak diartikan sebagai perkelahian massal antara dua kubu siswa suatu sekolah yang sering diakibatkan oleh hal-hal sepele, mulai dari saling mengejek, dan sampai tawuran karena salah satu sekolah memang ingin mengajak tawuran sekolah lain karena hanya ingin bersenang-senang.

KBBI (2012) menjelaskan faktor penyebab tawuran antar pelajar menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini adalah faktor yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh remaja dalam menanggapi milieu di sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Perilaku merupakan reaksi ketidakmampuan dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dalam pandangan psikologis,

setiap perilaku merupakan interaksi antara kecenderungan di dalam diri individu (internal), yang sering disebut dengan kepribadian, walau tidak selalu tepat.

Pelajar SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti tawuran, narkoba, kriminal dan kejahatan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang lebih baik dari pihak-pihak terkait guna mencegah pelajar untuk berbuat yang seharusnya tidak dilakukan dimasa remajanya.

C. *Display* Data Hasil Penelitian Peran Dinas Pendidikan

Dari hasil data yang direduksi, data-data tersebut secara rinci dibentuk dalam *display* data berikut ini:

Tabel 5. *Display* Peran Dinas Pendidikan di Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik Antar Sekolah Menengah Atas

| | Peran Dinas Pendidikan sebagai Fasilitator | Peran Dinas Pendidikan sebagai Pelayan Masyarakat | Peran Dinas Pendidikan sebagai Pendamping | Peran Dinas Pendidikan Sebagai Mitra | Peran Dinas pendidikan Sebagai penyanggah Dana |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peran Dinas | <p>Dinas melakukan dua upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Preventif <ol style="list-style-type: none"> a. Menginstruksikan kepada sekolah supaya sosialisasi kepada orangtua pada waktu PPDB. b. Membuat surat pernyataan tidak boleh melanggar peraturan sekolah saat diterima di sekolah. c. Membuat tim di kesiswaan (Osis), mengintensifkan bimbingan dan konseling di sekolah, serta melengkapi sarana dan prasarana sekolah seperti | <p>Peran dinas sebagai pelayan masyarakat melakukan upaya bimbingan waktu luang oleh guru, orang tua dan masyarakat lainnya. Upaya bimbingan waktu luang dilakukan dengan cara menggalang kegiatan yang bersifat hobi, organisasi kemasyarakatan, dan bersifat kegiatan sosial. Kegiatan yang dilakukan SMA Muhammadiyah 3 dan SMA Muhammadiyah 7 yang bersifat hobi meliputi kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara); elektronika; botani dan biologi; mencintai alam (mendaki gunung,</p> | <p>Peran Dinas Pendidikan sebagai pendamping yaitu mengintervensi sekolah supaya peran BK diaktifkan kembali dengan diberlakukannya pembelajaran dari kelas ke kelas selama satu kali pertemuan dalam satu minggu satu jam mata pelajaran dari kelas X hingga kelas XII. Selain itu, pihak Dinas juga mendorong sekolah dalam rangka penyediaan fasilitas untuk menyalurkan energi siswa dengan adanya berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler kesenian (seni tari, seni lukis, seni drama, seni suara);</p> | <p>Melakukan kerjasama dalam bentuk studi banding dari berbagai Universitas ternama di Yogyakarta supaya siswa menjadi sosok yang visioner sehingga memiliki tekad dan cita-cita yang positif sehingga mampu meminimalisir untuk terlibat dalam hal-hal negatif salah satunya konflik antar sekolah. Studi banding tersebut dilakukan pada kelas X dengan maksud siswa menjadi paham akan potensi yang dimiliki dan dapat diarahkan sedini mungkin supaya apa yang menjadi</p> | <p>Peran Dinas pendidikan sebagai penyanggah dana yaitu mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk Bosda baik sekolah negeri maupun swasta, sedang untuk JPD dianggarkan Rp 30 miliar. Anggaran yang ada diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Dana Bosda hanya digunakan untuk kepentingan</p> |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>laboratorium alat olahraga, masjid, kesenian alat-alat keterampilan.</p> <p>2. Upaya Kuratif</p> <p>a. Mengkoordinir sekolah supaya membuat tata tertib sekolah</p> <p>b. Melakukan pembatasan jam siswa berada dilingkungan sekolah</p> <p>c. Pemberian sanksi hingga sekolah siap mengembalikan kepada orangtuanya.</p> | <p>camping). 2) Bersifat keterampilan organisasi meliputi Organisasi remaja yang independen (OSIS); Organisasi olahraga; dan Pramuka. 3) Bersifat kegiatan sosial meliputi Palang Merah Remaja (PMR), Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL/BKU); dan Pemadam Kebakaran Remaja. Seluruh kegiatan tersebut diberlakukan dari saat kelas X hingga kelas XI dan kelas XII di bebas tugaskan karena siswa di arahkan untuk persiapan Ujian negara (UN).</p> | <p>elektronika; botani dan biologi; mencintai alam (mendaki gunung, camping); Organisasi remaja yang independen (OSIS); Organisasi olahraga; Pramuka; Palang Merah Remaja (PMR), Kelalulintasan dan Keamanan Umum (BKLL/BKU); dan Pemadam Kebakaran Remaja. Cara Dinas Pendidikan mendampingi yaitu melakukan evaluasi kepada sekolah setiap satu semester satu kali untuk mengukur tingkat indiscipliner yang dilakukan siswa dan meminta data kegiatan sekolah dalam bentuk ekstrakurikuler beserta jumlah siswa yang terlibat secara rutin setiap satu semester satu kali.</p> | <p>harapannya tercapai. Cara dinas pendidikan berperan sebagai mitra adalah dengan melakukan penjadwalan bagi setiap SMA yang berada di Yogyakarta supaya dapat melakukan studi banding secara bergilir ke universitas yang ditunjuk.</p> | <p>operasional sekolah, termasuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah semisal pengadaan fasilitas jaringan internet. Untuk anggaran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Dinas menganggarkan Rp 30 miliar untuk bantuan bagi siswa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). Nilai JPD bagi siswa berbeda-beda nilainya mulai dari Rp 1 juta - Rp 3 juta setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan karakter melalui sekolah</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | dengan lebih banyak kegiatan praktik tak hanya sekedar pendidikan teori saja. |
| Kendala Dinas Pendidian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komunikasi orang tua dan sekolah 2. Keterbatasan biaya untuk melakukan penanganan yang lebih khusus 3. Dukungan dan kerjasama pihak lain yang masih kurang. | |
| Upaya yang dilakukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jadwal persemester untuk pertemuan rutin antara orangtua dan sekolah supaya dapat mengetahui perkembangan masing-masing siswa yang didasarkan pada nilai hasil belajarnya sehingga siswa yang tidak mengalami perkembangan hasil belajar dapat dievaluasi secara langsung oleh orangtua maupun sekolah secara bersama-sama. 2. Melakukan kerjasama dengan psikiater atau psikolog handal dan kompeten dalam bentuk pendampingan kepada pelaku tawuran supaya dapat mengevaluasi tindakan yang dilakukan dan supaya kejadian tersebut tidak diulangi kembali. 3. Mengajukan pengajuan dana secara khusus kepada dinas untuk penanganan pelaku konflik antar sekolah sehingga tawuran tersebut tidak menjadi budaya yang dapat diwariskan generasi penerusnya. | |